



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



Geliat Cantik Bisnis Batik

Gerakan Kolektif



Siapa yang tak tahu batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Lahirnya batik tak terlepas dari perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.

Kesenian batik di Indonesia terus berkembang setelah abad ke-18 atau awal abad ke-19.

Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian. Lama kelamaan kesenian batik ini ditiru oleh rakyat jelata dan selanjutnya meluas sehingga menjadi pekerjaan dan bisnis.

Pada edisi kali ini, Cirebon Katon menyajikan tema khusus batik Cirebon. Diakui batik khas

Cirebon merupakan warisan budaya yang telah dikenal hingga mancanegara. Keberadaan batik khas Cirebon juga menjadi alasan banyaknya wisatawan yang berkunjung.

Kita berharap karya jurnalistik ini dapat menginspirasi bagi seluruh pembaca budiman dan memberikan informasi terkini kondisi para pelaku UMKM batik khas Cirebon beserta harapan mereka.

Seperti diketahui, batik diperkenalkan kepada dunia internasional oleh Presiden Soeharto saat mengikuti konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejak saat itu, batik sudah menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Terlebih beragam motif batik Cirebon yang telah merambah ke luar negeri. Selamat membaca kepada pembaca setia. Salam Cirebon Katon!

PEMBINA/PENASEHAT :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan, S.E.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

PENGARAH :

Hj Eriati
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

H. Sofwan, S.T
(Ketua Komisi 1)

R. Hasan Basori
(Ketua Komisi 2)

Anton Maulana, S.T, M.M
(Ketua Komisi 3)

Aan Setiawan, S.Si
(Ketua Komisi 4)

PIMPINAN UMUM/PIMPINAN REDAKSI :

Asep Pamungkas, SP, MP
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI :

drh. Encus Suswaningsih M.Si
(Kabag Humas Protokol, Kerjasama dan Aspirasi)

Isnaeni Jazilah, S.H, M.H
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

REDAKTUR PELAKSANA :

Dra. Puti Amanah Sari
(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda)

REDAKSI AHLI :

S. Yudi

REDAKTUR :

Yusuf

REPORTER :

• **Riyan • Amir**

FOTOGRAFER :

Qusoy

DESAIN GRAFIS :

Boyke Datu

DATA DAN RISET :

Oman

DISTRIBUSI :

Firman • Misbah

KORESPONDENSI:

redaksi.cika@gmail.com

PENERBIT :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Hari Batik Nasional
Peluang Pendongkrak Wisatawan

10 | Harapan Pelaku Usaha



14 | KILAS

Komisi IV Terima Aspirasi LSM Merah Putih



18 | PUBLIKA

Perlu Cegah Anarkis Suporter



22 | LENSА

Puluhan Tahun Rawat Wayang Cepak



24 | PROFIL

Ramdhani, S.T
Gemar Baca Sejak Belia

28 | DINAMIKA

Ketuk Palu Perda Bumdes

30 | Komisi I: Perlu Segera Wujudkan Digitalisasi Arsip

32 | Soroti Kenaikan Dana Cadangan Pilkada 2024

34 | Tanggapan Raperda Fasilitasi Pesantren



36 | POTENSI

Mangrove Pengarengan
Segera Hadirkan Wisata Edukasi



38 | DESA

Ciawijapura
Akan Punya Bank Sampah

Batik Cirebon

Peluang Pendongkrak Wisatawan



Siapa yang tak tahu batik? Batik sudah menjadi budaya khas Indonesia sejak ratusan silam. Pakaian dengan ragam corak ini dapat ditemui di berbagai daerah, tak terkecuali Kabupaten Cirebon yang juga memiliki kekhasan batik.

Tak hanya bernilai seni, batik telah bertransformasi industri. Industri batik berperan penting bagi perekonomian nasional serta menjadi penyumbang devisa negara, karena memiliki pasar ekspor yang besar seperti di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa.

Saat ini, batik juga merambah menjadi berbagai bentuk fesyen, kerajinan dan home decoration yang telah mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Bagaimana dengan Cirebon? Cirebon sendiri memiliki industri batik yang cukup besar dan menjadi pendongkrak kehadiran

wisatawan.

Beragam jenis batik Cirebon di antaranya: batik trusmi dan batik ciwaringin.

Keduanya menjadi jantung produksi batik Cirebon. Ada lebih dari seribu perajin batik yang bekerja setiap hari.

Ada dua motif batik Cirebon yakni pesi-siran dan keraton. Ornamen batik Cirebon cukup bervariasi karena keberhasilan keraton yang setia terhadap sultan, masyarakat Cirebon juga memiliki karakter terbuka terhadap budaya asing.

Ornamen yang dihasilkan misalnya paksi naga liman yang memperoleh pengaruh dari Persia, Tiongkok dan Arab.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah usaha batik di Kabupaten

Cirebon saat ini sebanyak 595 unit.

Jumlah tersebut tidak mengalami penambahan dalam empat tahun terakhir.

Meski demikian, para pengusaha batik di Cirebon menyebutkan, pembatik yang bekerja saat ini seba-

gian besar merupakan orang berusia di atas 45 tahun.

Sebagian besar generasi muda di Kawasan Batik Trusmi misalnya, lebih memilih bekerja di pabrik atau ke luar kota dibanding menjadi pembatik.

Oleh karenanya ini men-

jadi pekerjaan rumah Kabupaten Cirebon agar regenerasi pembatik tetap terjaga.

Dengan terkenalnya motif batik Cirebon, bisnis batik sejatinya menjadi peluang pendongkrak wisatawan sekaligus menambah pendapatan daerah.



UMKM Batik Cirebon: Jangan Lupakan Pelaku Kecil

Di balik kemasyhuran batik Cirebon, hanya 10 persen UMKM batik Cirebon yang sudah menjual secara daring. Selebihnya harus bertahan di antara raksasa besar galeri. Mengapa terjadi?



Belasan kain batik yang tengah dijemur tersusun rapi di depan halaman rumah Toifah. Kain-kain itu baru selesai dilukis Toifah dengan nuansa tumbuhan dan pepohonan. Siang itu di Blok Kebon Gedang Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Toifah terlihat lihai menggoreskan tinta ke canting selembur kain.

Untuk menyelesaikan satu kain, Toifah bisa menghabiskan waktu sebulan bahkan lebih jika motifnya rumit. Sementara kain yang selesai dilukis membutuhkan 2 hari untuk kering. Sebagian batik yang kering dijemur selanjutnya akan dijahit menja-

di baju. Sebagian lain akan ditumpuk di dalam etalase galeri.

Toifah harus merogoh kocek Rp 350 ribu untuk satu kain, jika menggunakan sutra, harganya bisa lebih mahal.

Toifah sudah menahun menjadi perajin batik Cirebon bermotif khas Ciwaringin. Saat usianya masih belasan tahun, Toifah sudah diajarkan cara membatik oleh orangtuanya. Hingga pada tahun 2014 dia membuka galeri di samping rumahnya bernama Batik Selfy.

Di tahun pertama membuka, galeri Toifah ramai



pengunjung dari luar Jawa bahkan wisatawan asing. Semua berubah saat pandemi datang. Toko galerinya mulai sepi pembeli. Bahkan pesanan dari luar pun semakin berkurang. Toifah hanya mengandalkan kedatangan wisatawan secara langsung.

Toifah mengatakan, pendampingan untuk perajin batik belum merata. Pemerintah Kabupaten Cirebon dinilai hanya melibatkan pemilik batik raksasa, sementara masih banyak perajin seperti Toifah harus bertahan di antara himpitan para pemilik batik raksasa..

“Kalau di Trusmi mungkin masih mending, sudah lebih tertata. Kalau di Ciwaringin, semenjak pandemi sama sekali tidak ada pengunjung. Kalau ada pameran, pemerintah hanya ajak orang tertentu saja,” katanya.

Toifah juga berupaya un-

tuk menjual produk batiknya melalui daring, tapi tetap tidak ada yang tertarik. Sehingga akun *marketplace* miliknya terbengkalai tidak terurus.

“Saya juga jual di *marketplace* dan media sosial, tapi karena saya tidak mengerti cara menggunakannya jadi tidak terurus,” ucapnya.

Toifah mengaku sempat berhenti produksi karena stok di galeri masih banyak yang belum terjual, sementara modal produksi tak kunjung kembali. Dia mengaku beberapa kali ditawari modal, namun belum dia ambil.

“Kalau tidak ada yang terjual bagaimana kita balik modal. Pernah ada yang nawarin modal, tapi saya tolak karena takut tidak bisa mengembalikannya,” tambah Toifah.

Hal serupa juga dialami Heri Kismo, pelaku UMKM batik dari

Desa Trusmi yang mengalami kendala pemasaran. Galerinya, Batik Hafiyon yang terletak di Jl Trusmi Kulon, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon juga ditinggal pembeli.

Laki-laki yang juga merupakan Ketua Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon (P3BC) itu mengatakan, masih banyak perajin batik yang mengalami persoalan pemasaran. Heri menjelaskan, selama ini ia dan pelaku UMKM sejenisnya hanya mengandalkan penjualan batik secara *offline*.

“Hanya 10 persen perajin ataupun pelaku usaha batik yang sudah menggunakan digitalisasi marketing melalui *Facebook*, *Instagram*, website, dan *Marketplace*,” kata Heri.

Ia pun membandingkan kondisi tersebut dengan daerah



lain yang telah maju seperti Pekalongan dan Solo.

“Cirebon masih kalah jauh. Beranda *marketplace* masih dipenuhi produk batik dari wilayah itu,” ujarnya.

Karena itu, dia berharap agar seluruh pelaku UMKM batik Cirebon benar-benar dilatih pemasaran *online*. Agar produk batiknya bisa dijangkau orang lebih luas, tidak hanya untuk pelaku usaha yang memang sudah punya nama besar saja.

Meski demikian, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cirebon Rodiya membantah tidak mendampingi para pelaku UMKM batik. Ia mengatakan, Disperindag telah beberapa kali

melakukan pelatihan untuk UMKM bidang pemasaran.

“Kita sudah beberapa kali melakukan itu. Setahun dua kali kami upayakan melakukan pelatihan pemasaran secara *offline* maupun *online*, hanya saja memang pesertanya dibatasi sekitar 30 agar lebih fokus,” ujar Rodiya.

Rodiya menjelaskan, mengapa masih ada perajin batik Cirebon yang sulit memasarkan produknya karena pandemi yang berdampak hampir di semua sektor. Termasuk pelaku usaha lainnya.

Rodiya mengklaim, telah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan produksi batik Cirebon melalui pendampingan secara *offline* dan *online*. Bahkan memfasiliasi gratis kepada pelaku usaha termasuk batik

untuk mengikuti pameran dan bazar di pasar-pasar tradisional atau modern.

Selain itu Disperdagin telah memberi bantuan kepada perajin batik berupa canting.

“Kami juga melakukan pendampingan melalui pelatihan untuk meningkatkan produk, harapannya kita jangan hanya menjual kain tapi juga berupa pakaian,” jelas Rodiya.

Baik Heri dan Toifah, hanya berharap agar Pemerintah Kabupaten Cirebon tak pilah-pilih dalam melakukan pendampingan.

“Kita ingin pendampingan merata bukan hanya pada perajin yang sudah besar melainkan perajin batik yang di level menengah dan masih merintis,” kata Heri. •Par

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Harapan Pelaku Usaha

Klasterisasi Perajin Batik



Komarudin (45)
(Ketua Umum Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia)

Sebagai pegiat batik, sangat menyayangkan regenerasi pengrajin batik di Cirebon sangat lamban. Sebab tidak ada pendidikan formal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Batik. Di sisi lain Alumni SMK lebih banyak berminat bekerja di industri-industri besar seperti mal dan pabrik padat karya.

Kalau tradisi membatik langgeng maka mau tidak mau Pemkab Cirebon harus memikirkan bagaimana pelatihan intensif membatik bagi pelajar. Misalnya setahun tiga kali dengan target yang jelas.

Seperti di Tasikmalaya, dalam setahun mampu menggelar pelatihan dengan target 3500 UMKM penjahit dan pengrajin batik. Kita sangat berharap seluruh pelaku UMKM batik Cirebon harus diikutsertakan dalam pameran internasional agar produk semakin diminat banyak orang.

Di luar itu, kita berharap Pemkab mulai melakukan klasterisasi bagi UMKM Batik. Kita melihat ada disparitas usaha. Para UMKM yang baru merintis justru tidak mendapat perhatian bahkan buta digital. Saya kira ini yang mesti dilakukan Pemkab Cirebon untuk meningkatkan produktivitas UMKM batik Cirebon.

Perbanyak Gelaran Pameran

Sudah 32 tahun saya menggeluti bisnis usaha batik. Sebagai pengusaha Batik Buana Mas, saya selalu siap mengikuti tren yang sedang berkembang, agar produksi batik tetap diminati seluruh kalangan dan status sosial.

Saya berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon rutin menggelar pameran batik. Tujuannya agar seluruh pelaku UMKM batik dapat mengikuti tren. Dan masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya semakin mencintai batik khas lokal.

Saya percaya jika pameran batik rutin diadakan, akan mendatangkan banyak pengunjung. Sehingga produk perajin batik Cirebon semakin diminati banyak konsumen. Saya telah membuktikannya setelah seringkali mengikuti pameran batik karena semakin laku.

Bahkan dalam sebuah pameran yang pernah saya ikuti di Sukabumi, saya mendapat penghargaan penjualan terbanyak. Dari situ juga saya mendapat banyak pelanggan baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari banyaknya pelanggan yang memesan, sekarang saya memiliki sekitar 500 karyawan. Barang dagangan saya pun telah terjual ke seluruh provinsi Indonesia. Bahkan ke pasar luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Jepang.



Elivinia (55)
Pemilik Batik Buana Mas

Permudah Peroleh Bahan Pewarna



Said (42)
Pemilik Batik Selfy

Pekerjaan nglorod dan mbiruni (mewarnai) merupakan dua tahapan dalam produksi batik setelah terbentuk pola di lembar kain.

Bekerja sebagai Tukang Lorod dan Mbiruni, saya bisa memproduksi 10 sampai 12 lembar dalam sebulan. Satu lembar kain biasanya saya mendapat upah bersih Rp 300 ribu. Untuk pembayarannya menunggu produknya terjual.

Dalam proses mewarnai, bahan dasar yang saya gunakan antara lain kulit mahoni, kulit pohon mangga, kulit jengkol, daun indigo dan kulit pohon tegeran. Bahan-bahan tersebut saya dapatkan dari luar kota. Misalnya daun indigo dan kulit pohon tegeran saya beli di Yogyakarta.

Saya pernah mengajukan ke Pemkab Cirebon agar bisa menyediakan daun indigo, pohon tegeran, pohon jolawe dan pohon tingi tersebut. Tujuannya agar pengrajin batik tulis berbahan warna alam bisa lebih mudah mendapatkan bahan warna tersebut. Kami sudah membuat proposal pengajuannya namun sampai sekarang belum ada kabar tindak lanjut.

Sebenarnya setiap pohon yang memiliki getah bisa diambil untuk pewarna, tapi tidak semua pohon tersebut akan memunculkan warna yang pekat dan bagus. Sedangkan warna dari kulit mahoni, daun indigo, pohon tegeran, pohon jolawe dan pohon tinggi ini sudah diteliti dapat memunculkan warna yang kuat.

Pastikan Generasi Pembatik

Sejak berusia 10 tahun, saya sudah belajar membatik kepada orang tua. Profesi itu kemudian menjadi jalan hidup saya hingga sekarang berumur 72 tahun. Di usia lanjut ini, penglihatan saya sudah berkurang. Aktivitas membatik saya pun terbatas hanya bisa membuat pola, membatik dan mbiruni atau menutup pola batik saat akan diwarnai.

Sedangkan proses lainnya dikerjakan oleh orang lain. Seperti mewarnai sampai lorod atau pembersihan terakhir, karena pekerjaan itu cukup berat dan biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki.

Saya amati tidak banyak anak muda di Ciwaringin yang mau belajar membatik. Sehingga pembatik di Ciwaringin kebanyakan telah lansia. Kalau pun ada anak muda yang konsen membatik, sepertinya hanya ingin menjadi penjual batik tanpa menjadi pengrajin batik. Padahal batik Cirebon merupakan warisan dari leluhur.

Karena itu perlu hal serius akan hal ini. Pemkab Cirebon bisa mencari solusi agar pekerjaan membatik diminat oleh anak-anak muda. Hal itu untuk memastikan keberlangsungan para perajin batik Cirebon khususnya Ciwaringin agar tetap ada.



Suminah (72)
Perajin Batik Ciwaringin

Tata Ulang Kawasan Batik

Beragam upaya telah direncanakan Pemkab Cirebon agar kawasan batik semakin diminati wisatawan. Salah satunya penataan dan integrasi KWBT. Seperti apa?



Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mewacanakan pengembangan kawasan batik Cirebon. Salah satunya di Kawasan Wilayah Batik Trusmi (KWBT) yang akan disulap seperti kawasan Malioboro. Rencana tersebut telah bergulir sejak 2017 saat Pemprov Jabar menetapkan Kawasan Metropolitan Cirebon Raya.

Pegawai Sub Koordinator Perencanaan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Cirebon Widyastuti mengatakan, penataan KWBT akan dimulai dari peningkatan jalan pada dua jalur sepanjang 400 meter.

Selanjutnya, penataan situs Kibuyut Trusmi yang akan dibangun gedung pertunjukan. Gedung terse-

but, berguna untuk wadah penampilan kesenian lokal. Juga tempat kegiatan pengenalan beragam kuliner dan kerajinan khas Cirebon di waktu tertentu.

Perencanaan rute transportasi dan rekyasa lalu lintas menuju obyek wisata juga disiapkan. Para wisatawan tak hanya akan mendapatkan keelokan KWBT, melainkan terintegrasi pula dengan wisata lainnya seperti kuliner, situs hingga industri rotan.

"Kompleks kawasan tersebut akan ditata ulang mulai tahun ini," ujar Widya.

Tak ketinggalan, sarana parkir juga akan dibangun di dua titik untuk transportasi wisatawan. Terakhir, pengembangan wisata kuliner dan kriya di sekitar KWBT.

Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian Dis-



perdagin Kabupaten Cirebon Rodiyah menargetkan sebanyak 30 pelaku Usaha Miro Kecil Menengah (UMKM) batik akan mendapat pembinaan agar kelas di tahun mendatang. Salah satunya melalui pelatihan digitalisasi marketing atau market place untuk pelaku UMKM Batik.

“Program kita menyesuaikan anggaran. Maka setiap tahunnya kita melibatkan hanya 30 peserta. Namun targetnya seluruh pelaku UMKM batik mendapat pelatihan ini,” jelas Rodiyah.

Di samping pembinaan, Disperdagin juga akan mengadakan pameran produk UMKM Batik.

Pameran ini digelar sebagai sarana promosi beragam produk batik Cirebon kepada para pengunjung yang datang. Nantinya sejumlah pelaku UMKM batik mengisi stand dan dapat mempromosikan produknya.

Rodiyah juga berjanji akan mengirim delegasi ekspose produk UMKM batik yang diadakan di luar daerah.

“Kita bawa beragam produk UMKM seperti makan dan fashion batik untuk dipromosikan ke acara tersebut. Jika nanti para pengunjung tertarik, kita akan hubungkan kepada pemilik batik itu sendiri,” katanya.

Tak lupa, Disperdagin akan membuat Fashion Show Batik untuk mengenalkan budaya batik. Melalui itu diharapkan batik Cirebon dapat dikenal lebih luas. Sebab masyarakat akan melihat langsung bahwa batik Cirebon tidak hanya dikenakan dalam kegiatan formal namun juga dapat dikenakan dalam keseharian.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Pandi, SE mengatakan, meski batik Cirebon telah dikenal dan mendunia, namun sejauh ini kawasan pasar hanya dinikmati segelintir pedagang batik saja.

Menurutnya, masih banyak pedagang batik yang sepi pembeli karena wisatawan hanya berkunjung di satu *showroom*. Dampaknya bukan hanya dirasakan pedagang batik, tetapi juga para perajin dan UMKM sekitar.

“Nasib perajin batik juga memprihatinkan. Sudah hanya mendapat upah murah, ditambah banyak dari mereka baru bisa menerima upah setelah kain batik buatannya terjual,” kata Pandi.

Oleh karenanya, Pandi mengingatkan agar pemerintah berkeajiban menata serius KWBT sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh perajin dan pengusaha batik maupun masyarakat luas. Misalnya dengan merekrut tukang ojek maupun dokar khas Cirebon untuk memudahkan pelayanan transportasi bagi wisatawan yang ingin berkeliling di kawasan batik trusmi.

“Kesimpulannya pemda menata ulang KWBT agar pengunjung tidak terjebak di satu titik saat berlibur di wisata pasar batik trusmi. Kalau pemda serius, kita bisa bahas bersama dengan SKPD-SKPD terkait. Dan, jika dibutuhkan kita undang investor,” pungkasnya. •Iz

Komisi IV Terima Aspirasi LSM Merah Putih

Komisi IV DPRD bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon menerima audiensi LSM Laskar Merah Putih (LMP) Cirebon. Mereka mengadukan dugaan korupsi dan gratifikasi dalam pengadaan barang elektronik di lingkungan Disdik.

Kepala Divisi Hukum LMP Cirebon Sunoko mengatakan, pengadaan barang elektronik tidak dilakukan secara transparan dan terbuka. Selain itu, terdapat sejumlah aspek yang tidak dipertimbangkan Disdik dalam memenangkan tender. Ia pun menilai, Disdik tidak transparan dan terkesan subjektif.

“Kami merasa ada kejanggalan pemilihan tender itu. Makanya kami minta Disdik segera mengklarifikasi permasalahan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setyawan menyambut baik langkah LMP Cirebon yang terus menjadi kontrol sosial. Ia pun memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap Disdik.

“Secara prosedur sebenarnya Disdik sudah sesuai dan tidak ada masalah, akan tetapi beberapa hal memang tidak dipertimbangkan Disdik sehingga timbul kecurigaan,” kata Aan.



Paripurna Jawaban Bupati Atas RAPBD 2023

DPRD Kabupaten Cirebon kembali menggelar rapat paripurna untuk mendengar jawaban Bupati Cirebon atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan APBD 2023.

Wakil Bupati Cirebon Hj Wahyu Tciptaningsih menyampaikan, alasan defisit sebesar Rp 170 miliar dalam rancangan APBD 2023 merupakan kebijakan yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut terjadi karena selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

terpaksa melakukan kebijakan kontraktif, dengan memperbesar pengeluaran untuk memaksimalkan sisi produksi.

Wahyu menerangkan, diharapkan kebijakn kontraktif tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di tahun mendatang.

Selepas mendengar jawaban Bupati, selanjutnya DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) akan membahas kembali RAPBD 2023 bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh instansi.



Jalan Santai Perayaan HUT TNI

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi mengikuti kegiatan jalan santai yang digelar Kodim 0620 Kabupaten Cirebon dalam rangka peringatan HUT ke-77 TNI.

Tak kurang ratusan peserta dari unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon, TNI, Polri dan masyarakat turut meramaikan jalan santai yang menempuh jarak 3,3 kilometer.

Dandim 0620 Kabupaten Cirebon Letkol INF Faurizal Noerdin mengatakan, perayaan HUT TNI pada tahun ini merupakan momen yang sangat baik untuk ber-

sama-sama mewujudkan persatuan bangsa dan negara.

“Tema HUT kali ini ‘TNI adalah kita’. Bagi saya maknanya sangat luas mendalam. Karena TNI ini dari berbagai warna, bentuk, wujud menjadi satu di masyarakat. Sebab TNI maupun Polri suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Faurizal berharap, melalui jalan santai ini, TNI akan semakin akrab dan kuat. Ia pun menginginkan negara bisa maju dan semakin tampil di dunia selepas pandemi.



Tukar Pikiran Optimalisasi Pendapatan Daerah

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mohamad Luthfi menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten OKU Timur Ir Hj Juniah menyampaikan, selain menjalin silaturahmi antar lembaga legislatif, kunker ini bertujuan guna tukar pikiran mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami melihat bahwa Cirebon salah satu daerah di Jawa Barat yang dinilai memiliki potensi besar PAD karena berada di lokasi yang strategis,” ujar Juniah.

Luthfi menyambut baik langkah Komisi III DPRD Kabupaten OKU Timur. Luthfi menjelaskan, beberapa inovasi DPRD Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan guna membantu peningkatan PAD. Diantaranya dengan mendorong sektor industri, pariwisata serta perdagangan barang dan jasa. Melalui tiga hal tersebut, Luthfi berkeinginan mengubah wajah Kabupaten Cirebon agar tidak hanya dikenal sebagai kota transit semata.

“Tiga hal tadi kuncinya di perubahan tata ruang. Inshaallah awal tahun depan kita akan genjot terus,” ujar Luthfi.



Perlu Cegah Anarkis Suporter

Assalamu'alaikum wr wb.

Peristiwa penyerangan terhadap tim sepak bola Pesik Kuningan, se usai bertanding melawan PSGJ Cirebon, merupakan preseden buruk bagi dunia sepak bola di wilayah Ciayumajakuning. Sikap tidak dewasa yang dilakukan segelintir oknum suporter terhadap Pesik Kuningan seolah tidak mencerminkan seorang pecinta olahraga.

Aksi pelemparan batu yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab tersebut, tidak hanya mencoreng nama baik tim sepak bola kebanggaan masyarakat Cirebon itu sendiri. Namun juga mengotori kemenangan PSGJ yang berhasil membukukan skor 3-0 atas Pesik Kuningan.

Dengan melihat dampak serta kerugian yang ditimbulkan, kiranya seluruh stake holder perlu membangun komitmen bersama untuk menjaga kondusifitas demi masa depan olahraga kedepan.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Johan/Karyawan/Kedawung)



Awasi Prostitusi di Bawah Umur



Praktik prostitusi anak di bawah umur yang diungkap Satreskrim Polres Cirebon Kota di wilayah Desa Pilangsari beberapa waktu lalu terdengar begitu memprihatinkan. Dua remaja wanita berusia 14 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar diketahui menjadi korban prostitusi anak.

Kedua remaja tersebut diduga kerap dipekerjakan sang mucikari dengan tarif beragam.

Namun terlepas dari itu semua, saya berkeyakinan selama ada permintaan, pasti ada penawaran. Artinya, jika pemerintah tidak mampu memutus mata rantai bisnis gelap tersebut, praktik prostitusi anak, akan selamanya ada.

Saya berharap, peran DPRD ikut andil untuk mitigasi serta mengedukasi masyarakat agar praktik prostitusi ilegal bisa dicegah.

(Fitria/IRT/Pilangsari)

Lampu Cirebon Katon Rusak

Salam hormat Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Sebelumnya perkenalkan saya Ilham (22) asal Desa Kertawinangun. Saya ingin melaporkan kondisi lampu bando (Cirebon Katon) yang berada di sepanjang jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung.

Lampu yang diresmikan Pemkab Cirebon pada Agustus 2021 itu kini terlihat rusak dan tak nyala. Dari total 12 unit, kini hanya tinggal sebagian yang masih berfungsi.

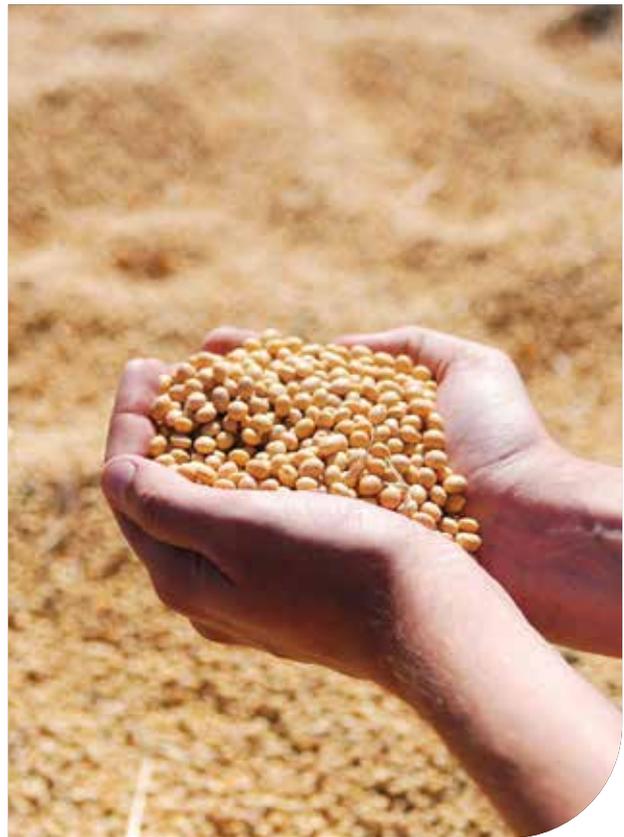
Sungguh disayangkan, lampu perias malam yang bertujuan untuk menarik wisatawan itu kini dibiarkan rusak tanpa adanya upaya pemeliharaan, bahkan ada yang hanya menyisakan pilarnya saja.

Saya kira, Pemkab Cirebon jangan hanya pandai membangun. Meski tujuannya baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pemeliharaan, maka akan terkesan sia-sia saja. Terimakasih Cirebon Katon berkenan menerbitkan.

(Ilham/Sopir/Kertawinangun)



Keluhan Harga Kedelai Tinggi



Sebelumnya, saya ucapkan terimakasih Cirebon Katon berkenan menerbitkan. Saya Bisri, warga Desa Cipeujeuh Wetan. Sebagai salah satu pelaku bisnis kedelai, saya ingin menyampaikan keluhan mengenai lonjakan harga kedelai impor yang mencapai Rp 13 ribu per kg.

Kenaikan tersebut memaksa pelaku usaha kedelai mengurangi jumlah produksi, dan secara otomatis berimbas langsung terhadap laba yang dihasilkan.

Sementara dari pihak konsumen, mereka mengeluh karena produk hasil olahan kedelai seperti tahu dan tempe berukuran lebih kecil. Di saat yang sama, para pengrajin yang mayoritas pelaku UMKM tidak dapat berbuat banyak akibat naiknya harga kedelai, yang normalnya Rp 9 ribu per kg, kini naik hampir 50%.

Saya berharap Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon bisa membantu untuk menekan harga kedelai. Terimakasih.

(Bisri/Pedagang/Cipeujeuh Wetan)

Siwang Ma'ipeh

Dulu Reseller, Sekarang Bos Retail

Semula Ma'rifah hanyalah reseller produk siwang hingga sukses di pasar retail. Bagaimana perjalanan pemilik Siwang Ma'ipeh?



Tak banyak tahu, jika Cirebon memiliki jajanan khas daerah bernama Siwang. Siwang atau terasi bawang merupakan campuran antara terasi dan bawang merah yang disangrai sehingga memiliki aroma terasi yang kuat.

Ada banyak para pelaku UMKM yang memproduksi Siwang. Namun sedikit yang mampu *survive* di ruang pasar. Di antara yang mampu bersaing dan mengisi toko oleh-oleh Cirebon dan retail modern yakni Siwang Ma'ipeh. Pemiliknya adalah Ma'rifah, warga Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon.

Sebelum berhasil mencapai puncak ini, Ma'rifah

mempunyai kisah tersendiri. Semula ia hanyalah *reseller* Siwang milik saudaranya. Namun itu tak berlangsung lama. Suatu hari, saudara Ma'rifah tak lagi memproduksi Siwang, sementara permintaan pelanggan tetap berdatangan.

Beregal pengalamannya menjadi reseller, Ma'rifah memberanikan diri membuat Siwang, produksinya dengan modal seadanya.

"Setelah 6 bulan jadi reseller, tahun 2017 saya mencoba produksi sendiri karena saudara saya punya anak kecil jadi tidak bisa fokus membuat Siwang," jelas Ma'rifah.

Saat itu, Ma'rifah mengawali usahanya dengan



membeli sekilo bawang dan terasi guna memenuhi para pelanggannya.

Tak ada nama brand, legalitas, bahkan kemasan. Ma'rifah bahkan hanya memakai plastik biasa untuk wadah siwang.

Seiring waktu, peminat Siwang buatan Ma'rifah ternyata semakin bertambah. Tahun 2018, Ma'rifah pun mulai serius mengembangkan usahanya dengan mengurus sertifikat perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) beserta memilih nama brand.

"Waktu itu ikut acara Disperindag, jadi tidak dipungut biaya. Dan akhirnya saya memutuskan memilih nama brand Siwang

Ma'ipeh," ujarnya.

Di tahun berikutnya, Ma'rifah juga mengurus sertifikasi halal dan rutin mengikuti program yang diadakan Disperindag. Salah satunya program Comprehensive Industry Coaching (CIC) Disperindag. Ia pun belajar banyak tentang usaha, seperti *marketing*, *branding*, dan jaringan promosi.

Berkat ketekunannya mengembangkan usaha, saat ini Siwang Ma'ipeh mulai banyak dikenal. Dalam sebulan, Ma'rifah mampu memproduksi 450 kilo Siwang.

"Sekarang 2 hari goreng 30 kilo. Bawangnya juga pakai bawang Brebes, kata pelanggan

saya sih baunya lebih wangi," kata Ma'rifah.

Siwang Ma'ipeh memiliki 2 ukuran kemasan. Ukuran 100 gram yang dijual dengan harga Rp 27 ribu dan ukuran 65 gram yang dibandrol Rp 20 ribu. Harga tersebut bisa berubah bagi reseller. Sementara ada 3 varian yaitu, original, pedas, ekstra pedas, dan mix all varian.

Siwang Ma'ipeh dapat ditemukan ditoko oleh-oleh Cirebon, Kuningan dan Bandung. Ma'rifah juga menjualnya di marketplace seperti, Shoppe, Lazada, Tokopedia, Dan Blibli. Selain itu, Ma'rifah juga punya banyak reseller dari Jawa dan luar Jawa.

"Ada di Asia Toserba, Surya Toserba, dan toko oleh-oleh sekitar Kuningan, Bandung. Saya juga punya reseller dari Tasikmalaya, Cikampek, Sumedang sampai Kalimantan," ungkapnya.

Tak hanya itu, Siwang Ma'ipeh juga sudah bertandang ke negara Asia yang dibawa para TKI Cirebon di Taiwan dan Jepang. Meski demikian, Ma'rifah belum berniat mengeksport Siwang Ma'ipeh ke luar negeri.

"Dulu pernah ditawari untuk ekspor, tapi banyak prosedurnya. Saya pusing jadi saya tahan dulu. Belum lagi minimal *expired* 1 tahun, sementara Siwang saya hanya 6 bulan," jelasnya.

Saat ini, Ma'rifah memiliki 10 pegawai yang membantunya mengupas sekaligus memotong bawang. Sementara untuk produksi dia ditemani 1 saudaranya. Siwang Ma'ipeh telah tersedia dalam bentuk botol, toples, dan *pouch*.

"Sekarang mudah diiburu di Surya Cirebon, Jatibarang, Kuningan, Asia dan beberapa supermarket lainnya," pungkasnya.

•Par



Puluhan Tahun Rawat Wayang Cepak

Hampir di setengah usianya, ia wakafkan untuk kemajuan budaya, utamanya dunia seni wayang Cepak.

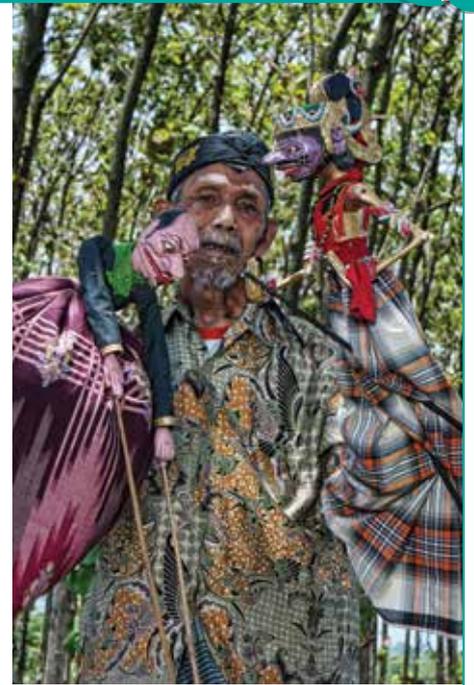
Ki Etom, merupakan salah satu maestro dalang wayang Cepak yang kini masih aktif mengenalkan kesenian khas Cirebon itu kepada anak-anak.

Ki Etom pun tak sungkan mengajak anak-anak bermain bersama dengan wayang Cepak.

Sambil membaca lakon Babad Cirebon, Ki Etom memperagakan wayang. Dengan riang gembira anak-anak pun menirukannya.

Bagi Ki Etom, itu adalah cara sederhana menjaga wayang Cepak agar tetap dikenal dan terawat. •Soy





Drs H Asup Suparlan, M.Pd Guru Prestasi yang Hobi Bertani

Asup sempat meraih penghargaan sebagai guru matematika berprestasi sebelum menjabat kepala sekolah. Bagaimana kisahnya?





Jatuh cinta terhadap hitung-menghitung tak pernah Asup prediksi. Kemahirannya dalam matematika baru ia ketahui saat duduk di bangku sekolah SMP. Hal itu lah yang menjadi alasan Asup melabuhkan cita-citanya menjadi pendidik.

Ia pun memilih berkuliah dengan mengambil prodi matematika. Kini, pemilik nama lengkap Asup Suparlan itu menjabat sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Plumbon. Sebelumnya, Asup lebih dahulu menjadi guru hingga dosen selama bertahun-tahun.

Bagi seluruh jajaran guru dan siswa SMP N 1 Plumbon, sosok Asup dikenal *humble* dan dekat dengan murid-muridnya. Asup tak sungkan untuk bergaul dan bergurau dengan siapapun.

Sebelum menjabat orang nomor satu di sekolah, Asup lebih dahulu menjadi guru matematika. Ia juga sempat mengajar di beberapa universitas ternama di Cirebon. Diantaranya, Universitas Gunung Jati (UGJ), IAIN Syech Nurjati Cirebon hingga Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC).

“Memang sebelum sekarang, saya lebih dahulu menjadi dosen matematika,” ujarnya.

Barulah di tahun 2013, Asup mulai didapuk menjadi kepala sekolah. Pertama kali sekolah yang ia pimpin yakni SMP Negeri 1 Karang Wareng. Pengembarannya pun dilanjutkan di SMP N 1 Losari, SMP N 1 Palimanan, SMP N 2 Jamblang,

“
Saya seperti
sekarang ya
hasil dari bertani
orang tua saya
”

SMP N 2 Susukan, SMP Negeri Kedawung hingga saat ini di SMP Negeri 1 Plumbon.

“Dari 2013 saya dilantik sudah muter di beberapa sekolah. Baru di tahun 2021 ini saya dipercaya di SMP N 1 Plumbon. Jadi sudah 8 tahun saya menjadi kepala sekolah,” jelas pria alumni UGJ tersebut.

Apa yang ia peroleh bukan tanpa sebab. Saat masih menjadi guru biasa, Asup dinobatkan sebagai guru berprestasi bidang matematika. “Guru berprestasi itu saya dapat pada tahun 2013 ada seleksi guru di Kabupaten Cirebon, saya ikut karena saya suka menulis, ada uji kompetesinya dan saya menang,” ungkapnya.

Bagi Asup, menjadi pendidik merupakan *fashion* dan pilihan hidup. Ia sangat bangga saat ada muridnya yang menjadi orang hebat dan sukses.

“Sekarang saya punya anak angkat bernama Bahijah. Saya benar-benar mendidik dia sejak SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Alhamdulillah sekarang sudah ikut program S2. Walaupun orang kampung, karena kemam-

puannya luar biasa jadi bisa tergali,” ujarnya bercerita.

Selain rasa bangga dan terharu saat berhasil mendidik murid, menjadi pengajar merupakan kesenangan tersendiri bagi Asup.

“Kalau disuruh milih memang saya suka jadi dosen, karena studinya fokus. Tapi kalau di sekolah ada kelebihan sendiri karena kita juga turut membantu anak-anak menggali potensi,” jelasnya.

Di luar kesibukannya mengajar, alumnus SMP Negeri 1 Klangeran itu juga memiliki hobi bertani. Bertani, merupakan profesi turunan dari orang tuanya. “Kalau lagi enggak ngajar ya saya bertani, sama kaya masyarakat Plumbon pada umumnya,” katanya.

Asup mengungkapkan, karena bertani ia bisa bersekolah hingga masuk di perguruan tinggi.

“Saya seperti sekarang ya hasil dari bertani orang tua saya. Saya punya sawah sendiri kalau libur saya ke sawah sambil *refreshing*,” ungkap Asup.

Asup telah berhasil mengubah wajah SMP N 1 Plumbon yang semula kurang tertata menjadi lebih baik. Sebut saja bangunan musala yang dulu terlihat kumuh, melalui tangannya, kini terlihat bersih dan rapih.

“Saya suka bersih-bersih. Intinya menciptakan sesuatu yang kumuh menjadi indah dan bersih. Makanya tadi juga saya sempatkan minta untuk rapihkan pohon dan pembenaan lobby,” kata Asup. •Kus



Naura Amalia

Atlet Penembak yang Raih Ragam Medali

Naura kembali berhasil mengharumkan nama daerahnya dengan capaian medali ajang menembak. Bagaimana kisahnya?

Poin seri, babak final cabang olahraga menembak 10 meter air pistol women Porprov XIV Jawa Barat 2022 menemukan atlet Kabupaten Cirebon dengan Bekasi.

Atlet penembak Kabupaten Cirebon Naura Amalia mendapat giliran terakhir. Tiba-tiba saja pertandingan terasa begitu berat. Kemenangan dan kekalahan tim ada di pundaknya.

“Waktu itu kita sama Bekasi sebelum *last shoot* itu poinnya seri. Tembakan terakhir giliran aku,” ungkap Naura, sapaan akrabnya.

Satu sentimeter saja meleset, habis sudah harapan meraih medali emas. Tapi Naura paham, ia sudah berjuang sejauh ini. Kini saatnya ia bertawakal. “Pas final kita pasrah. Yang penting teknik yang benar dulu,” ucapnya.

Peluru dilesatkan. Suasana tiba-tiba terasa hening sejenak. Naura menoleh ke Wafi, rekan duetnya. Wafi mengangguk, mengisyaratkan Naura telah berhasil.

“Sebelum akhir, kita seri. Dua orang tim dari Bekasi dapat nilai 9 dan 10. Dan Alhamdulillah waktu itu, *last shot* saya dapat sepuluh. Dan sebelumnya Wafi dapat nilai 10,” ungkap Naura,

menceritakan.

Naura tersenyum lebar. Berbalik lalu berlari ke arah ayahnya yang sedari awal pertandingan menjadi pendukung utama untuknya. “Kita menang, Ayah,” pekik Naura sambil memeluknya.

Begitulah detik-detik paling berkesan bagi Naura, sebagai atlet penembak yang berhasil meraih medali emas. Ia pun mengharumkan nama daerah.

Naura adalah mahasiswa hukum UNS. Di sela-sela waktu, ia masih berlatih menembak. Masih banyak capaian-capaian lain yang menjadi targetnya di masa depan.

Bagi Naura, membagi waktu sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Ia tak pernah meninggalkan pendidikan meski ia harus berlatih keras mengasah bakatnya.

Naura memilih menggeluti cabang menembak, berkat ayahnya. Ayah Naura bernama Ali Mashar, yang juga atlet penembak asal Kabupaten Cirebon. Naura tak jarang berlatih bersama.

Naura menceritakan, seorang pelatih berkata kepada ayahnya waktu itu, bahwa Naura memiliki bakat kuat menjadi atlet menembak.

“Saat kelas 5 SD aku diajak ayah untuk latihan di IRanggaja-



ti, karena ada pelatih Korea yang datang ke Kabupaten Cirebon,” katanya.

Naura sangat menikmati hari-harinya dengan menembak. Ia senang bisa dekat dengan dunia ayahnya.

“Senang ngerasa dekat sama dunianya ayah. Aku tahu bakatnya ini. Punya aktifitas di luar sekolah. Punya keinginan dan *value* yang berbeda dari orang lain,” ujarnya.

Tapi Naura bukan tanpa hambatan. Tak mendapat izin dari sekolah sempat menyulitkannya. Sebab kala itu, menembak masih menjadi cabang olahraga yang tidak begitu familiar di sekolah. Barulah ketika beranjak SMP dan

SMA ia mendapat dukungan penuh dari sekolah.

Pertama kali Naura mengikuti kejuaraan saat kelas 6 SD. Setahun berikutnya, ia memenangkan kejuaraan Porda Jabar 2014 di Bekasi. Berlanjut pada 2016, ia meraih medali emas 10 Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat.

Di tahun 2018, Naura kembali meraih emas Porda Jabar. Ia mengantongi dua sekaligus medali emas. Terbaru pada 2022 di Porda Jabar, ia menambahkan perolehannya dengan merahi 3 medali dan satu perunggu.

Di Porprov XIV Jawa Barat lalu, Naura mengikuti 3 cabang perlombaan sekaligus. Tentu

saja, tidak mudah untuk bisa terpilih masuk ke kejuaraan Porda. Sebab pelatih hanya akan mengikutsertakan orang-orang terbaik, yang disiplin dalam latihan.

Naura merasakan betul menjadi atlet. Selain kerja keras, biaya pun tak sedikit yang harus dikeluarkan.

beda. Perlu modal. Sampai sepuluh nomor, ada atlet itu bisa main segitu. Kasihan juga.”

Meski demikian, Naura tidak pernah patah arang. Bagi Naura menembak adalah dunianya saat ini. Dari dulu, Naura hanya menjalankan hobinya. Ia tidak menduga karena hobinya pula, ia mampu mengharumkan nama daerahnya. •Iz

Ketuk Palu Perda Bumdes

Setelah melalui tahapan panjang, Perda Bumdes resmi diketuk palu pada paripurna. Bagaimana perjalanan sebelum disahkan?



Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) akhirnya resmi disahkan dalam paripurna DPRD.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) II yang bertugas mengkaji raperda tersebut telah selesai dan mengkaji bersama tim raperda Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana ST MM mengatakan, raperda Bumdes dan Bumdesma telah dibahas dan dikaji. Sebagaimana amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diharuskan membentuk Bumdes yang dibebankan dari dana desa.

“Sebelum disahkan menjadi Perda, Pansus II su-

dah melakukan tahapan pembahasan sebelumnya. Dan kami sepakat untuk mengesahkan pada paripurna sekarang,” ujar Anton.

Seperti diketahui, Perda Bumdes dan Bumdesma diinisiasi DPRD Kabupaten Cirebon pada 2021 dan masuk pada program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022. Harapan tersebut agar ada payung hukum yang bersifat baku untuk Bumdes di Kabupaten Cirebon.

Anton menerangkan, landasan hukum sebelumnya yakni Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Bumdes sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan perundang-undangan.

“Sehingga sudah sangat tepat adanya perubahan Perda,” terangnya.



Saat ini, landasan yuridis Perda Bumdes mengacu pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Bumdes bahwa desa dapat mendirikan Bumdes dan Bumdesma.

Sementara syarat untuk menjadi pengurus Bumdes dan Bumdesma sebagaimana yang diatur dalam raperda yakni prasyarat KTP, pendidikan SLTA atau sederajat, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dinyatakan bersalah dan tidak pernah dihukum karena melakukan pidana.

“Kemudian memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai. Artinya memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama saat menduduki jabatan bumdes,” kata Anton dalam pemaparannya.

Sementara masa jabatan sebagai sebagai pengurus bumdes dan bumdesma, menurut Pasal 23 Ayat 1 yakni 5 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak dua kali masa jabatan. Untuk komposisinya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara

Anton mengungkapkan, Pansus II telah melakukan perbandingan dengan daerah lain mengenai perda bumdes sebelum disahkan.

Ia berharap, dengan lahirnya Perda Bumdes, Pemkab Cirebon akan melakukan program pembinaan dan pengembangan untuk seluruh Bumdes melalui dinas tertentu.

“Kita ingin Bumdes dan Bumdesma bisa tumbuh dan kita mendorong agar turunan menyusun peraturan bupati juga bisa segera dilakukan untuk pelaksanaan teknisnya,” jelas Anton.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Hanafi mengatakan, tujuan Perda Bumdes agar potensi yang ada di desa dapat tergali optimal sehingga terwujudnya desa yang mandiri. Sejauh ini, ia menilai potensi seluruh desa di Kabupaten Cirebon sangat beragam namun belum mampu dikelola dengan baik.

Selain itu, banyak bumdes yang stagnan atau layu sebelum berkembang. Hanafi mengatakan, persoalannya bermacam-macam seperti akses permodalan dan sulitnya pemasaran. Padahal, kata Hanafi, potensi usaha di desa sangat besar seperti pertanian dan perikanan.

“Ada bumdes sudah bagus tapi karena alasan enggak bisa setor malah bangkrut sering terjadi. Makanya kita ingin coba carikan solusi melalui Perda,” ujarnya.

Dengan lahirnya Perda Bumdes Hanafi berharap akan menggeliatkan kembali Bumdes dan mendorong desa memiliki usaha.

“Potensi di desa harus kita kembangkan dan harus kita gali bukan hanya itu tetapi pelayanan umum bisa kita kembangkan di desa dan dinaungi bumdes. Dan pada akhirnya desa punya pendapatan yang meningkat,” pungkasnya. •Kus

Komisi I: Perlu Segera Wujudkan Digitalisasi Arsip

Komisi I menekankan, upaya digitalisasi arsip oleh Diskarpus harus segera diwujudkan agar kerusakan dan kehilangan arsip dapat diantisipasi.



Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Cirebon dinilai belum berbasis digital bahkan masih mengandalkan cara manual. Melihat itu, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon khawatir arsip yang tersimpan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kabupaten Cirebon sewaktu-waktu akan hilang baik karena rusak maupun karena kejadian tertentu.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan mencontohkan, banjir yang pernah melanda Cirebon tahun lalu telah menyebabkan puluhan arsip perusahaan maupun perorang hilang. Sehingga, upaya keseriusan menjaga dan melindungi arsip berbasis digital harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Apalagi arsip-arsip vital itu bisa gampang ru-

sak sekali kalau kena air atau api. Kita harap ada langkah pencegahan,” ujar Sofwan, saat memimpin kunker di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Cirebon.

Menurut Sofwan, digitalisasi arsip merupakan salah satu cara melindungi dan menyelamatkan arsip-arsip penting. Dengan digitalisasi arsip, juga berdampak terhadap pelayanan publik. Sejauh ini, daerah yang telah menerapkan digitalisasi kearsipan adalah Kota Cirebon melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Cirebon.

Karena itu, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Dispusip Kota Cirebon guna menggalakan pelaksanaan digitalisasi arsip.

“Istilah digitalisasi arsip sebenarnya sudah lama didengar namun Kabupaten Cirebon belum mener-



apkan. Makanya kunker ini ingin mengetahui bagaimana kebijakan pusat dan walikota untuk mendorong digitalisasi arsip," ujar Sofwan.

Seperti diketahui, arsip yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik terbagi menjadi tiga. Yaitu arsip umum yang dapat dipublikasi, arsip terbatas dan arsip rahasia yang menyangkut keamanan rahasia negara.

Sekretaris Dispusip Kota Cirebon Sumarni menyampaikan, terdapat 6 Arsiparis di Dispusip Kota Cirebon. Keenam tersebut terbagi ke dalam bidang perlindungan dan penyelamatan arsip serta bidang pengelolaan arsip.

Sumarni menyebut, di tahun 2022 bidang perlindungan dan penyelamatan arsip telah memperoleh anggaran sebesar Rp 60 juta. Sedangkan bidang pengelolaan arsip senilai Rp 420 juta.

Sumarni mengungkapkan, jika digitalisasi arsip Dispusip Kota Cirebon baru melakukan tahap *scanisasi* terhadap arsip-arsip yang ada. Karena itu menurutnya, pengelolaan arsip di Kota Cirebon masih perlu ditingkatkan kembali. Baik secara manajemen maupun infrastruktur pendukung.

"Kami baru melakukan digitalisasi dari dokumen fisik ke dokumen digital. Di luar itu, kami

melakukan perawatan, pemeliharaan dan melestarikan arsip yang ada," ungkapnya.

Sementara ini, sebuah aplikasi arsip bernama Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SIKDT) karya Pemkot Cirebon juga belum berjalan optimal. Penyebabnya karena kebijakan akseibilitas dan konektivitas dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Pemkab Cirebon sendiri sebenarnya telah meluncurkan aplikasi serupa bernama Srikandi pada Mei 2022 lalu, namun belum terealisasi optimal.

Dalam persiapan penerapan aplikasi Srikandi, Pemkab Cirebon telah mengadakan bimbingan teknis kepada para Arsiparis maupun para pengelola arsip dari unsur perangkat daerah. Namun sejauh ini, upaya digitalisasi arsip tersebut masih jalan di tempat.

Meski demikian, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon sangat mendukung langkah Pemkab Cirebon dan berkomitmen agar penerapan dan pengintegrasian Srikandi dalam sistem pemerintahan segera terwujud. Hal itu bertujuan agar Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat berjalan dengan baik.

Dengan optimalnya implementasi SPBE, maka kontrol terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintah, termasuk pemerintah di Kabupaten Cirebon juga bisa berjalan beriringan.

Karena itu, Sofwan mengingatkan, butuh peran serta dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah dan semua *stakeholder* untuk mewujudkannya.

"Dengan begitu, kita berharap indeks nilai SPBE Kabupaten Cirebon bisa meningkat dan arsip-arsip kita bisa terlindungi," pungkas Sofwan. •Iz.

Soroti Kenaikan Dana Cadangan Pilkada 2024

Dana cadangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 mengalami kenaikan 69 persen dibanding tahun 2018. Bagaimana respon DPRD?



Bupati Cirebon Drs H Imron menghantarkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Dana Cadangan Pilkada tahun 2024 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Cirebon. Imron mencanangkan dana cadangan Pilkada 2024 sebesar Rp 84,6 miliar.

Melihat itu, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Nurholis menyoroti hantaran tersebut. Ia membandingkan besaran dana cadangan Pilkada 2024 yang terpaut jauh dengan Pilkada 2018. Sebagaimana Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, hanya memakan anggaran Rp 50 miliar. Sementara Pilkada 2024 naik drastis Rp 84 miliar.

“Naik sebesar 69 persen. Kami minta penjelasan komponen apa saja yang naik secara signifikan, dan apa alasannya sehingga muncul nilai yang fantastis itu,” jelas Nurholis.

Nurholis menilai, kenaikan dana cadangan Pilkada 2024 akan memberatkan APBD di tengah iklim ekonomi yang berpotensi krisis. Ia pun berpendapat, Pemda harus menghemat dan meninjau kembali anggaran yang dirasa tidak perlu.

Berdasarkan naskah hantaran bupati, dana cadangan tersebut berasal dari perubahan APBD 2022 sebesar Rp 44,6 miliar dan APBD murni 2023 sebesar Rp 40 miliar.

Senada itu, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon



Fraksi Golkar Hj Diah Irwany juga meminta Pemda memberi penjelasan dasar hukum penentuan jumlah dana cadangan Pilkada 2024 yang dinilai membengkak.

“Kita ingin tahu apa asumsi penentuan jumlah dana cadangan Pilkada dari APBD perubahan 2022 dan APBD murni 2023 sehingga muncul nominal lebih besar,” kata Diah.

Diah juga menanyakan penggunaan dana cadangan Pilkada

2024 akan seperti apa.

“Disimpan dimana, atas nama siapa, apakah dalam bentuk saldo tabungan, atau dalam simpanan deposito?” tuturnya.

Wakil Bupati Cirebon Hj Wahyu Tjiptaningsih mengatakan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 80 Ayat 4, dana cadangan ditempatkan di rekening terpisah melalui kas umum daerah. Namun tetap tidak terpi-

sah dari APBD.

Ayu menerangkan, kenaikan dana cadangan Pilkada 2024 telah menyesuaikan kebutuhan perlengkapan selama tahapan Pilkada. Di antaranya, dana cadangan akan membiayai honorarium KPPS, layanan administrasi perkantoran, perjalanan dinas PPK dan PPS, pembuatan TPS hingga kebutuhan komponen TPS.

Menurut Ayu, keterbatasan keuangan daerah untuk membiayai Pilkada 2024 menjadi alasan pentingnya dana cadangan untuk kebutuhan yang tak terduga.

“Sehingga Perda ini menjadi sangat penting untuk segera disahkan agar tahapan Pilkada mulai dapat berjalan di tahun depan,” ujar Ayu.

Sementara itu Bupati Cirebon Drs H Imron menjelaskan, pembiayaan dana cadangan merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemilihan Gubernur, Pilbup dan Pilwalkot.

“Supaya prosesnya berjalan baik karena memang anggaran Pibup harus bersumber dari anggaran daerah,” kata Imron.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana mengatakan, raperda dana cadangan Pilkada 2024 masih sebatas hantaran dan usulan. Ia mengaku telah membentuk panitia khusus (pansus) yang akan membedah dan mendalami dana cadangan tersebut.

“Nanti akan kita perinci. Bicarakan pansus yang bekerja nanti untuk menelaah. Apakah sudah sesuai untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kemarin fraksi sudah banyak yang menanyakan,” pungkasnya. •Par

Tanggapan Raperda Fasilitasi Pesantren

Jumlah pesantren yang cukup banyak di Kabupaten Cirebon menjadi alasan kehadiran raperda dianggap penting.



Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren saat ini telah memasuki babak baru.

DPRD Kabupaten Cirebon kembali menggelar paripurna untuk mendengar jawaban Bupati Cirebon atas raperda pesantren.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Hanafi mengatakan, raperda pesantren diinisiasi DPRD untuk turut andil memfasilitasi pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurutnya, pesantren dari segi historis merupakan satu lembaga tertua yang ada di Indonesia dan telah dikenal sebelum fase kemerdekaan.

Pesantren saat ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang pesat.

Ia mengungkapkan, pesantren di Kabupaten Cirebon memiliki jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon sudah sependapat atas usulan



DPRD, bahwa raperda tersebut bertujuan menjamin terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

“Di Kabupaten Cirebon pesantren telah mendarah daging sebagai pilihan pendidikan masyarakat. Sehingga diperlukan aturan untuk memenuhi fasilitas yang sesuai standar,” ungkap

Hanafi.

Politisi Golkar itu menjelaskan, dibutuhkan partisipasi baik dari masyarakat maupun pemerintah terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di pesantren.

“Kita berharap bupati bisa mengoptimalkan peran seluruh stakeholder agar raperda ini bisa segera disahkan,” jelasnya.

DPRD akan segera mengkaji raperda melalui panitia khusus bersama tim raperda pemerintah

Daerah.

“Semoga ini bisa menjadi raperda yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cirebon Khususnya,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron menilai banyak pesantren belum dikelola dan terfasilitasi dengan baik. Ia pun mengapresiasi langkah DPRD Kabupaten Cirebon mengusulkan raperda.

“Saya melihat ada pesantren yang pengelolaannya kurang layak seperti minimnya sarana dan prasarana yang mendukung,” jelasnya.

Padahal pesantren sudah terbukti memiliki peran nyata, baik dalam pergerakan maupun perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Serta pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Cirebon.

“Di Kabupaten Cirebon, pondok pesantren sudah menyatu dengan dalam praktik keseharian masyarakat,” kata Imron.

Pemerintah juga mengafirmasi melalui terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal itu menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam.

Tidak hanya rekognisi, UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.

Lahirnya UU yang berpihak pada kaum sarungan ini, berawal dari sederet keresahan yang dialami oleh kalangan pesantren.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dinilai belum mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan yang jumlahnya menurut data Kementerian Agama pada 2018 mencapai 28.194 unit. •Kus

Mangrove Pengarengan Segera Hadirkan Wisata Edukasi

Tak hanya berguna untuk tangkal abrasi. Di tangan Jay, keberadaan Hutan Mangrove Pengarengan disulap jadi wadah edukasi wisata. Seperti apa?



Berada di lokasi bibir pantai utara Cirebon, membuat Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, membutuhkan perlindungan dari abrasi.

Semula Jaynudin, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarawis) hanya ingin mencegah terjadinya abrasi laut. Ia bersama komunitasnya pun bersama-sama menyepakati untuk menanam mangrove di sepanjang bibir laut. Lambat laun, Jay sapaannya, menyadari bahwa, hutan mangrove merupakan satu potensi wisata yang dapat mendatangkan wisatawan.

Di tangan Jay, sumber daya alam mengorve disulap tak hanya sebatas cegah abrasi melainkan sebuah wisata edukasi.

“Kalau daerah pesisir identik dengan mangrove. Dan memang potensi di Desa Pengarengan setahu saya hanya ini. Makanya kami ingin punya wisata laut,” ujar Jay.

Belum lama ini, Hutan Mangrove Pengarengan ini telah diresmikan secara simbolis oleh Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Jay menjelaskan, Hutan Mangrove Pengarengan masih dalam kategori pengembangan wisata. Beberapa fasilitas telah tersedia seperti taman, rumah makan, tempat pembibitan mangrove, jalan dan sarana pendukung lainnya.

Jay mengungkapkan, Hutan Mangrove Pengarengan diinisiasi oleh kelompok wisata dengan



bantuan dari PT Cirebon Power melalui anggaran *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

“Memang kita didanai 100 persen dari PT Cirebon Power. Kalau Pemdes Pengarengan baru suport moril karena belum punya anggaran,” ungkap Jay.

Meski telah diresmikan, Jaynudin mengatakan, Hutan Mangrove Pengarengan masih akan dikembangkan untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pengunjung.

Di antaranya, Jaynudin akan mengatur biaya tiket masuk wisata serta menyediakan la-

han parkir. Selain itu, Jay juga berkeinginan mewadahi para pelaku UMKM desa agar bisa berjualan di sekitar lokasi. Ada juga spot selfi di taman dan di tengah hutan Mangrove.

Sejauh ini, Jay menerangkan, Hutan Mangrove Pengarengan baru 10 persen dari rencana pembangunan. Kedepan akan dibangun jembatan dan lorong kecil di tengah hutan untuk penghubung beberapa lokasi mangrove.

“Ya sekarang belum seideal yang kita rencanakan karena masih tahap pengembangan. Namun kita targetkan tahun depan

pembangunan selesai 100 persen,” terangnya.

Harapan mempercepat pembangunan wisata mangrove juga telah direspon Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon Drs Imron mengapresiasi apa yang dilakukan Pokdarwis Desa Pengarengan meski masih banyak hal yang harus diperbaiki. Imron berjanji akan membantu pembangunan Hutan Mangrove Pengarengan.

“Banyak yang harus diperhatikan dari mulai jalan sampai kebersihan yang harus ditingkatkan lagi. Dan kami akan mencoba menganggarkan untuk wisata mangrove ini dalam APBD 2023,” ujar Imron.

Imron mengajak agar masyarakat dan sejumlah perusahaan saling membantu dan berperan aktif mengembangkan Huta Mangrove Pengarengan.

“Kami ajak perusahaan dan dinas untuk ikut serta membantu wisata ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan BBWS untuk pembenahan sungai di sini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi mengingatkan agar Pemkab Cirebon benar-benar mendukung terhadap objek wisata desa seperti di Desa Pengarengan. Luthfi menilai, dengan hadirnya wisata desa tentu akan beriringan dengan peningkatan ekonomi.

“Itu bahkan sesuai dengan keinginan kita semua agar potensi wisata yang ada di Kabupaten Cirebon benar-benar bisa kita garap. Bupati harus *support*. Tadi kita lihat sepanjang jalan ke arah sini masih rusak. Kita harus bersama-sama membangun akses yang nyaman agar wisatawan pun mau berdatangan,” tandas Luthfi. •Kus

Ciawijapura Akan Punya Bank Sampah

Pemdes Ciawijapura mulai berbenah dalam mengentaskan sampah.
Direncanakan akan punya Bank Sampah. Seperti apa?



Ade Sri Sumartini (Kuwu Desa Ciawijapura)

Sebelum hampir di setiap sudut jalan Desa Ciawijapura, Kecamatan Susukan Lebak, terlihat sangat kotor karena tumpukan sampah. Tak heran banyak warga yang mengeluh akan kondisi tersebut.

Namun sejak dua bulan lalu, Pemdes Ciawijapura mulai berbenah. Mereka membuat program pengentasan sampah.

Setiap Sabtu pagi, jajaran perangkat desa akan rutin menyalir jalan dengan melakukan kegiatan bersih-bersih.

“Sejak dua bulan lalu kami mulai membersihkan sampah-sampah

dengan dibantu warga dan para pemuda desa,” ujar Kuwu Desa Ciawijapura Ade Sri Sumartini.

Tak hanya jalan, pembersihan sampah juga menyalir ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Selain itu, Ade juga mulai mengatur pengangkutan sampah rumah tangga.

Ade menugaskan karang taruna desa untuk menjadi petugas pengangkut sampah dari rumah menuju TPS. Untuk membiayai itu, warga ditarik iuran Rp 30 ribu dalam sebulan yang dialokasikan untuk operasional dan transportasi.

“Pemdes belum menganggarkan di bidang persampahan. Jadi untuk saat ini pemdes baru bisa melakukan pengangkutan dari rumah warga ke TPS saja,” ungkapnya.

Sejauh ini, lebih dari 100 rumah warga telah rutin memakai jasa angkut sampah.

Ade mengatakan, ke depan pengelolaan sampah ini akan dilimpahkan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan mendirikan Bank Sampah.

Bank Sampah akan memberi manfaat kepada warga, dan mendorong pemilahan sampah organik dan non organik sejak dari rumah.

“Setiap pengumpulan sampah akan dicatat oleh Bumdes sesuai dengan harga sampah yang akan ditukarkan,” jelas Ade.

Setelah mencapai nominal yang diinginkan, warga akan diberikan kupon sesuai dengan harganya. Setelah itu, warga bisa menukarkan kupon tersebut dengan sembako berdasarkan nominalnya.

“Misalnya untuk menukar dengan minyak warga harus mengumpulkan sampah sesuai dengan harga minyak tersebut,” kata Ade.

Ade berharap, melalui Bank Sampah, sedikit-demi sedikit permasalahan sampah mulai dapat ditangani dengan baik sehingga dapat menyejahterakan warga. • Soy

Kamarang

Bakal Sughkan Wisata Pertanian

Sebuah konsep wisata pertanian yang memadukan tradisional dan modern tengah dibangun Pemdes Kamarang. Belum apa-apa, sudah datangkan wisatawan?

Tak banyak yang tahu, jika Desa Kamarang, Kecamatan Greged memiliki potensi wisata alam yang sangat luar biasa. Alhasil, Pemdes Kamarang tengah bergeliat mengembangkan potensi ekonomi melalui wisata yang tengah dibangun.

Kuwu Desa Kamarang Endang mengatakan, sektor wisata akan menjadi cara pemdes memulihkan ekonomi warga setelah pandemi.

Agro Edu Wisata (AEW) atau wisata edukasi pertanian sedang digarap di atas tanah 2 hektare. Agro Edu Wisata merupakan wisata edukasi tentang pertanian zaman tradisional dengan zaman modern seperti sekarang.

“Nantinya pengunjung akan kembali ke alam, mengenal sawah dengan terjun langsung. Dan secara modern kita akan memanfaatkan internet optik sebagai pengendali pemanfaatan pupuk, air hingga pemusnah hama,” ujar Endang.

Selain itu, sebuah pusat kuliner berkonsep *fresh for farm* atau makanan langsung pertanian akan disediakan di lokasi AEW bersamaan spot selfi dan beragam aksesoris wisata.

“Poin utamanya wisata ini benar-benar menghadirkan alam pertanian yang indah,” jelas Endang.

Saat ini, Pemerintah Desa Kamarang sudah mengenalkan



agro edu wisata melalui penjualan paket wisata. Paket wisata tersebut meliputi pembelajaran pertanian, peternakan, serta *homestay*.

“Karena kita ingin memajukan ekonomi warga, maka rumah warga juga akan disewakan untuk *homestay* wisatawan,” ungkapnya.

Untuk satu paket wisata, Pemdes Kamarang mematok harga Rp 300 ribu per orang. Dengan harga tersebut, para wisatawan akan mendapatkan keindahan agro edu wisata dari pembelajaran alam, penginapan, kesenian dan makanan.

“Kemarin kita sudah ke-

datangan orang Jakarta sebanyak 2 bus. Untuk satu paket mereka bisa menikmati selama sehari 2 malam dan menginap di *homestay* yang telah disediakan,” kata Endang.

Selain agro edu wisata, Desa Kamarang juga memiliki wisata *outbond* yang terletak di sekitar bukit. Para wisatawan akan dimanjakan dengan beragam permainan tradisional dan modern.

“Baik agrowisata dan *outbond* kita punya harapan akan dapat mendatangkan banyak pengunjung sehingga mampu meningkatkan pendapatan desa dan warga,” pungkas Endang. •Kus

Bakung Lor Bersiap Jadi Desa Mandiri

Berbagai upaya agar naik kelas menjadi desa mandiri tengah dilakukan Pemdes Bakung Lor. Salah satunya peningkatan ekonomi warga di bidang UMKM tape. Seperti apa?



Menyandang gelar sebagai desa mandiri merupakan prestasi yang diinginkan setiap pemimpin di lingkup desa. Tak terkecuali bagi Watma, Kuwu Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon.

Menjadi orang nomor satu di di desa berjuduk 'Bakung Alas' itu, Watma bertekad membawa Desa Bakung Lor menjadi desa mandiri dari semula desa berkembang di sisa akhir masa jabatannya.

Meski tak mudah, Watma mengatakan, akan terus bekerja dan memusatkan perhatiannya terhadap program-program

pembangunan sebagaimana visi Desa Bakung Lor.

"Kita ingin membawa Desa Bakung Lor dapat mandiri, religius, sejahtera, inovatif, tertib dan aman. Kami menamakannya Marsita," ujarnya.

Untuk mencapai itu, Watma pun mendorong para pelaku usaha di Desa Bakung Lor agar membangun sentra oleh-oleh. Selanjutnya dijual untuk pariwisata terpadu di Kecamatan Jamblang.

Watma mengatakan, Pemdes Bakung Lor secara aktif mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi mengembangkan produksi makanan rumah

khususnya kudapan yang berbahan dasar tape ketan.

"Kebetulan di daerah kami produk unggulan UMKM itu tape ketan. Dan itu sudah dikenal luas," ungkap Watma.

Tak hanya meningkatkan UMKM, peningkatan kesejahteraan di bidang pertanian pun tak luput dari perhatian Pemdes Bakung Lor. Watma mengaku, sedang menggenjot progres pembangunan embung bagi para petani agar tak lagi kesulitan mengairi sawah terutama saat kemarau tiba.

Selain untuk mendistribusi pasokan air, embung tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai pilihan destinasi wisata baru di Desa Bakung Lor.

"Kemarin sudah kita lakukan pengurusan dan rencananya mau kita sender. Semoga tahun depan dapat terlaksana," ungkapnya.

Perbaikan kinerja perangkat desa disertai pembangunan sejumlah sarana terus diakselerasi agar Desa Bakung Lor segera naik kelas menjadi desa mandiri. Melalui usaha-usaha tersebut, Watma berharap seluruh program kerjanya dapat membawa manfaat untuk Desa Bakung Lor di masa mendatang.

"Saya hanya punya harapan di sisa jabatan bisa memberi peninggalan yang bisa bermanfaat untuk terus dikembangkan," tandas Watma. •Mir

Guwa Kidul

Pelayanan Cepat Berkat Website

Segala informasi dan pelayanan di Desa Guwa Kidul cukup diakses melalui website, setelah Pemdes Guwa Kidul meluncurkan program digitalisasi desa. Seperti apa?

Pemerintah Desa (Pemdes) Guwa Kidul, Kecamatan Kaliwedi, patut berbangga setelah berhasil mewujudkan pelayanan warga berbasis digital. Tidak sedikit, masyarakat Desa Guwa Kidul yang mengakui pelayanan desa dianggap cepat.

Sejak tiga tahun lalu, Pemdes Guwa Kidul meluncurkan *website* guna menunjang informasi dan kebutuhan masyarakat.

Kuwu Desa Guwa Kidul Ade Firdaus mengatakan, desa harus bisa berkembang mengikuti zaman yang semakin cepat. Tak terkecuali dalam pelayanan.

"Website ini saya sendiri yang buat sejak tahun 2019 lalu. Saya rasa setiap desa punya kewajiban untuk berkembang mengikuti zaman," kata Ade.

Di dalam website terdapat banyak fitur. Mulai dari statistik desa, peta lokasi desa, pengaduan warga dan informasi seputar kegiatan di Desa Guwa Kidul.

"Masyarakat juga merasa puas dengan pelayanan cepat website. Bahkan banyak juga yang membandingkan dengan pelayanan desa sebelah," ungkap Ade.

Selain itu, website juga menyediakan data kependudukan, sehingga bukan hal sulit bagi Pemdes Guwa Kidul saat mencari data warga.

Semula, pada awal digita-



lisasi pelayanan, tidak sedikit perangkat desa yang mengeluh kesulitan. Namun, seiring waktu akhirnya terbiasa dan terbantu dengan adanya website tersebut.

"Awalnya banyak perangkat desa yang terbebani karena ada website itu, mungkin karena masa percobaan. Tapi sekarang mereka malah senang karena merasa dimudahkan," jelasnya Ade.

Bahkan saat ini, Ade mengaku telah membantu pembuatan website untuk beberapa desa. Sekitar 13 desa di 3 kecamatan telah ia dorong agar memiliki website pelayanan.

"Dulu membuat website itu harganya Rp 35 juta, saya kasihan jadi saya bantu beberapa kuwu yang saya kenal untuk membuat website desa," ungkap Ade.

Ade mengatakan, apa yang dilakukannya karena ia ingin desa-desa bisa maju. Sehingga ia merasa bangga karena Desa Guwa Kidul dapat menjadi contoh untuk desa-desa lain.

"Karena kebetulan saya sukali ilmu teknologi (IT) sejak remaja. Jadi minimalnya pengetahuan saya bisa membantu Desa Guwa Kidul agar berkembang," katanya. •Par



Mari Menitik

Canting berisi malam bergerak mengikuti karsa. Seorang hamba menitik di atas hamparan kain nan lebar (*amba*) dengan sepenuh jiwa. Begituulah sepenggal proses batik tercipta. Namun, akankah proses kreatif itu hanya sampai pada dimensi produksi?

Tentu saja tidak. Batik kini bukan lagi soal identitas sosial: pakaian bangsawan, pesisiran, atau pedalaman. Bukan juga hanya soal manifestasi filosofi hidup para pengrajin dan pemakainya. Ia kini telah menjadi komoditas ekonomi, seiring meluasnya tren penggunaan batik dan menjadi gaya busana (*fashion style*).

Semangat zaman ini harus terus digaungkan. Agar permintaan pasar tetap terjaga dan meningkat. Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir serius membenahi sektor ekonomi tersebut dalam bingkai ekonomi kreatif, yang ditangani oleh Kemenparekraf.

Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai penciptaan nilai tambah yang berbasis ide dan kreativitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan warisan budaya, serta teknologi. Konsep ini jelas menempatkan kreativitas sebagai faktor utama dalam kegiatan ekonomi.

Namun, apakah itu cukup ditangani kementerian? Tentu, upaya pemerintah pusat harus juga didukung oleh semua lapisan masyarakat, terutama pemerintah daerah. Terlebih pemerintah daerah-lah yang lebih paham akan muatan lokal produk batik di daerahnya. Batik trusmi dan batik ciwaringin memiliki kekhasan sendiri di banding daerah lainnya.

Pengrajin, UKM atau IKM, bahkan industri besar itu memiliki karakter pejuang. Modal utamanya semangat. Mereka bukan tipikal manusia cengeng, dikit-dikit minta bantuan pemerintah. Kasarnya, tanpa campur tangan pemerintah pun mereka memang sudah dituntut untuk tumbuh.

Bahkan, pada titik tertentu mereka sebenarnya sudah membantu pemerintah, terutama dari aspek

pembangunan ekonomi: mengurangi pengangguran, meningkatkan PDRB, dan pendapatan asli daerah berupa pajak.

Meski sektor usaha mampu bergulir secara mandiri, pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk mendukung dan memompa pertumbuhan mereka. Tentu saja pada akhirnya juga akan berdampak pada kinclongnya kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi dan kebahagiaan warganya.

Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah daerah? Di tengah usaha atau industri yang semakin tumbuh, fungsi utama pemerintah adalah melakukan harmonisasi, baik secara internal maupun eksternal.

Harmonisasi internal terdiri dari dua hal. Pertama, harmonisasi di internal perbatikan. Pemda harus mendorong dan menciptakan agar adanya harmonisasi antara pengrajin, usaha kecil, dan usaha besar untuk menjadi satu ekosistem mitra perbatikan yang tumbuh bersama. Sehingga meminimalisasi UKM bangkrut akibat ulah korporasi. Perusahaan besar harus membantu pengrajin dan UKM tumbuh.

Harmonisasi internal yang kedua adalah menciptakan sinergitas antar-sektor. Kawasan ekonomi kreatif harus terintegrasi dengan rencana induk pengembangan pariwisata, penataan kota, serta kegiatan budaya dan olahraga.

Sedangkan harmonisasi eksternal, pemda harus menjadi fasilitator pendongkrak pemasaran batik Cirebon. Salah satunya, misalnya, memperbanyak agenda event yang mempromosikan batik, baik digelar di Cirebon, luar Cirebon, maupun luar negeri.

Jadi, agar industri batik di Cirebon maju, pemda pun harus turut 'membatik'. Turut menjadi hamba yang menitik. Kenapa? Karena titik-titik batik itu menjadi indah ketika menciptakan harmoni.

Untuk itu mari kita sama-sama menitik, bukan asal memercik. Melengkapi harmoni batik dengan harmoni kebijakan. Sehingga kesatuan titik-titik itu menjadi keindahan yang membahagiakan, baik secara gaya maupun ekonomi. Disitulah Cirebon Bahagia.

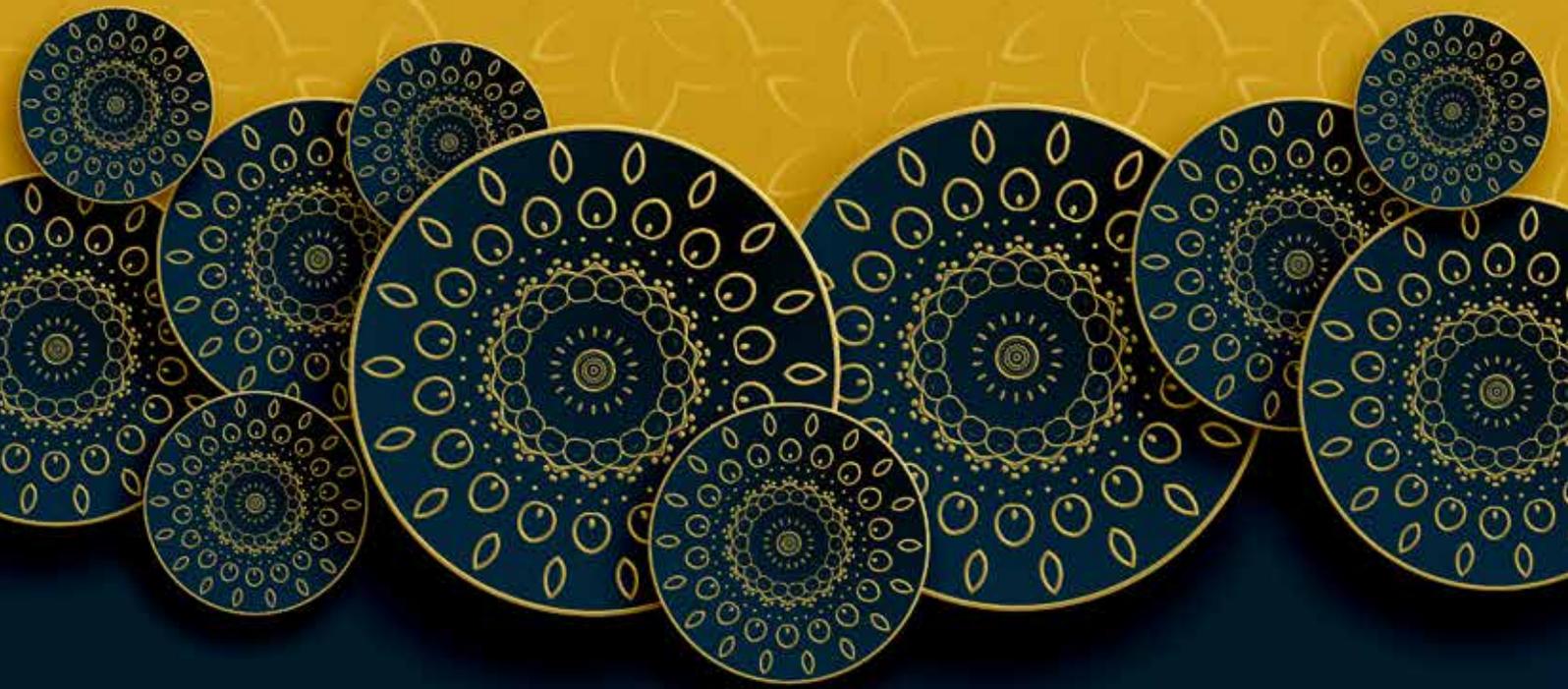


**SEKRETARIAT DPRD
DAN SELURUH PEGAWAI**

Mengucapkan Selamat

***Selamat menunaikan
ibadah puasa***

1 Ramdhan 1445 H





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
1 Ramadhan 1445 H